

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) DAN PROSES PENGADOPSIANNYA DI INDONESIA

Risma Wira Bharata¹, Ghina Fitri Ariesta Susilo², Agustina Prativi Nugraheni³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
e-mail : rismawirab@untidar.ac.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
e-mail : ghinafitri.ariesta@untidar.ac.id

³Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
e-mail : devi.agustina@untidar.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the process of IFRS adopting in Indonesia. Initially the International Accounting Standards Boards created the IASC which produces IAS and later changed to IASB which produces IFRS. The reason the boards makes standards is because the need for accounting standards throughout the world is very large, especially in the global era of industrial competition requires uniformity of accounting standards so that the financial statements can be compared with others. The adoption of IFRS for countries around the world is carried out in full or in stages. The adoption of IFRS in Indonesia to become a financial accounting standard is carried out through various stages, namely the adoption stage, the final preparation stage, and the implementation resistance. In the adoption process, human resources are still constrained. To overcome this obstacle, a continuous training was held for DSAK and IFRS users in theory and practice.

Keywords – IFRS, Adoption, Convergence, Implementation, Accounting Standard

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadopsian IFRS di Indonesia. Awalnya dewan standar Akuntansi Internasional membuat IASC yang memproduksi IAS dan kemudian berubah menjadi IASB yang memproduksi IFRS. Alasan dewan membuat standar karena kebutuhan standar akuntansi di seluruh dunia sangatlah besar apalagi persaingan industri di era global ini menghendaki keseragaman standar akuntansi sehingga antar laporan keuangan bisa dibandingkan dengan yang lain. Pengadopsian IFRS bagi negara-negara di seluruh dunia dilakukan secara penuh maupun bertahap. Pengadopsian IFRS di Negara Indonesia agar menjadi standar akuntansi keuangan dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir, dan tahan implementasi. Di dalam proses pengadopsian itu, masih terkendala mengenai sumber daya manusia. Untuk mengatasinya kendala tersebut, maka diadakannya pelatihan yang berkelanjutan bagi DSAK dan para pengguna IFRS secara teori maupun praktek.

Kata Kunci – IFRS, Adopsi, Konvergensi, Implementasi, Standar Akuntansi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat ditengah persaingan global membuat pelaku usaha harus meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebuah perusahaan pastinya bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya demi kesejahteraan pemegang saham. Jika prospek perusahaan bagus maka harga saham perusahaan akan meningkat karena investor akan menanamkan sahamnya di perusahaan itu dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari deviden yang dibagikan setiap periode oleh perusahaan kepada pemegang saham.

Persaingan global saat ini sangat kompetitif sehingga sekat pembatas antar negara sudah tidak kelihatan lagi menyebabkan perusahaan-perusahaan antar negara saling bersaing, saling merger, saling akuisisi, atau membuka cabang-cabang perusahaan itu di luar negeri. Ternyata dalam perkembangannya muncul permasalahan tentang perbedaan bahasa, standar akuntansi, dan mata uang untuk setiap negara menurut Baridwan dalam perkuliahan Teori Akuntansi dengan topik Akuntansi Internasional di Magister Sains Akuntansi FEB UGM pada tanggal 07 Mei 2012. Dari ketiga perbedaan ini, yang dapat dipersamakan hanya standar akuntansi. Walaupun ada yang sudah berupaya menyamakan mata uang seperti di benua Eropa berlaku uang Euro. Sedangkan bahasa juga mulai diberlakukan bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional. Tetapi hal itu sulit terwujud karena setiap negara sudah mempunyai bahasa dan mata uang sendiri yang merupakan ciri khas dari suatu negara.

Isu yang sedang populer sekarang ini adalah harmonisasi standar akuntansi untuk seluruh dunia. Harmonisasi menurut Wolk, et.al (2008) mengacu pada tingkat koordinasi atau kesamaan di antara berbagai perangkat standar akuntansi nasional dan metode dan format pelaporan keuangan. Faktor - faktor yang mendasari keinginan harmonisasi menurut Wolk, et. al (2008) adalah peningkatan kepentingan perusahaan multinasional. Kesamaan standar umum dan prosedur akuntansi akan memfasilitasi koordinasi antara bagian-bagian dari perusahaan multinasional. Secara khusus, laporan keuangan konsolidasi pasti akan lebih mudah jika aturan akuntansi yang berlaku untuk berbagai bagian dari perusahaan multinasional lebih konsisten. Sekarang istilah harmonisasi disebut konvergensi.

Negara Indonesia harus melakukan konvergensi IFRS menurut Setiyono, et. al (2011) agar dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia disamping itu Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum. Menurut IAI (2008), Konvergensi IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi karena laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik. IFRS dapat menjadi referensi utama dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh yang disusun oleh para ahli dan dewan konsultatif internasional dari seluruh penjuru dunia. Artikel ini adalah sebuah tinjauan mengenai IFRS tentang sejarah, karakteristik, manfaat penerapan, tahapan adopsi, persiapan adopsi dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan IFRS untuk negara Indonesia.

2. SEJARAH IFRS

Sejarah IFRS yang panjang dengan diawali oleh pemikiran beberapa negara untuk mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia pasti berawal dari suatu permasalahan yang dihadapi pada waktu itu. Berawal dari perkembangan dunia bisnis yang mana pasar modal dunia terbuka kepada para investor seluruh dunia untuk berinvestasi di perusahaan manapun di seluruh dunia. Hal ini melatarbelakangi munculnya ide menyeragamkan standar akuntansi untuk menyeragamkan standar akuntansi di seluruh dunia agar terjadi kemudahan dalam pelaporan akuntansi. Ide itu direalisasi dengan membentuk suatu organisasi *standard setter* yang berkala Internasional.

Pada akhir tahun 1960-an, perwakilan lembaga-lembaga profesional akuntansi negara Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat membentuk *Accountants International Study Group* (AISG) dengan tujuan untuk mengkaji terhadap kemungkinan melakukan harmonisasi standar akuntansi dan auditing negara tersebut. Pada kongres profesi akuntan dunia di Sidney pada tahun 1972 yang biasanya diadakan setiap lima tahun, perwakilan-perwakilan AISG bertemu kembali untuk membahas proposal pembentukan *International Accounting Standard Committee* (IASC). (Purba, 2010:2)

Pada tanggal 23 Juni 1973, IASC terbentuk di Inggris yang diwakili oleh profesi akuntansi negara Inggris, Amerika Serikat, Australia, Canada, Prancis, Jerman Barat, Jepang, Mexico, dan Belanda. Pembentukan IASC bertujuan untuk memformulasi standar, mendorong keberterimaan standar, mempromosikan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi di seluruh dunia. IASC mengeluarkan produk yang bernama *International Accounting Standard* (IAS). (Wolk, Dodd, and Rozicki: 2008)

Pada tahun 2000, IASC melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan dibentuknya *IASC Foundation* (IASCF) yang membawahi *International Accounting Standard Board* (IASB) dan *International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC). IASB membuat standar akuntansi dan pelaporan keuangan dengan nama *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang diberlakukan disamping IAS yang sudah ada (Purba, 2010:3).

Tujuan IASC dengan membuat IAS adalah untuk mengharmoniskan standar akuntansi di seluruh dunia, namun IASC sendiri tidak berhak memaksa setiap negara didunia untuk mengadopsi standar itu. Di dunia ini untuk negara yang sudah maju telah menerapkan standar akuntansinya sendiri. Akan tetapi masih ada beberapa negara yang tidak mempunyai standar akuntansi sehingga negara itu mengadopsi IAS. Setelah adanya revisi dan tambahan dalam IAS, maka semakin banyak negara yang mulai berpartisipasi dalam kegiatan IASC yang berstatus sebagai otoritas internasional yang tumbuh pesat. Status itu lebih ditingkatkan setelah perkembangan yang signifikan (Wolk, Dodd, and Rozicki; 2008), antara lain adalah:

- a. Pada tahun 2002, Komisi Eropa dengan Peraturan Eropa 1606 pada tanggal 19 Juli 2002 mewajibkan entitas yang terdaftar di Uni Eropa untuk mengadopsi IFRS mulai tahun 2003.
- b. Pada tahun 2003, Australia, Hong Kong dan Selandia Baru bersedia untuk mengadopsi IFRS.
- c. Pada tahun 2005, sekitar 7.000 perusahaan yang ada di 25 negara menerapkan IFRS.
- d. Pada tahun 2006, IASB dan FASB bersepakat untuk konvergensi antara IFRS dan GAAP di Amerika Serikat.
- e. Pada tahun 2007, Brasil, Canada, Chile, India, Jepang, dan Korea berencana untuk mengadopsi IFRS.

- f. Pada tahun 2007, SEC di Amerika Serikat menghapus ketentuan rekonsiliasi untuk perusahaan non-US yang menerapkan IFRS, dan berkonsultasi pada IFRS untuk perusahaan domestik.

3. KARAKTERISTIK IFRS

IFRS sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang diharapkan dapat mengharmoniskan standar akuntansi di seluruh dunia mempunyai karakteristik atau keistimewaan daripada standar akuntansi yang lain karena dibuat oleh sebagian besar negara di dunia yang pasti memadukan kepentingan dan ciri khas standar di negara masing-masing.

Menurut Kurniawan (2009) dalam Simbolon dan Nadeak (2010), IFRS memiliki karakteristik, diantaranya:

- a. IFRS menggunakan "*Principles Based*" sehingga lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada *spirit* penerapan prinsip tersebut.
- b. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.
- c. Membutuhkan *professional judgment* pada penerapan standar akuntansi.
- d. Menggunakan *fair value* dalam penilaian.
- e. Mengharuskan pengungkapan (*disclosure*) yang lebih banyak.

Sesuai karakteristik IFRS diatas, penulis berpendapat bahwa IFRS menggunakan *principles based* karena aturannya lebih umum dan lebih pendek daripada menggunakan *rules based*. *Rules based* menurut Wolk, Dodd, and Rozicki (2008) merupakan aturan yang lebih detail, sering memiliki banyak pengecualian, membutuhkan petunjuk implementasi yang luas dan sering kali memiliki perbedaan aturan yang jelas yang dapat ditumbangkan oleh manajemen. Manajemen diberi kebebasan dalam menggunakan standar akuntansi dalam operasi perusahaan. Tetapi hal itu akan menyebabkan ketidakseragaman di antara perusahaan-perusahaan di suatu negara. IFRS baru berencana menyeragamkan standar akuntansi negara di seluruh dunia. Niatan IFRS menurut penulis sudah bagus karena IFRS harus menyeragamkan standar akuntansi negara di dunia dengan *principles based* yang lebih longgar dan lebih pendek sehingga memberi kesan kepada negara-negara di dunia

bahwa IFRS mudah diterapkan dan *fleksible*. Setelah semua negara di dunia sudah mengadopsi IFRS, penulis menyarankan supaya IFRS sedikit demi sedikit menyeragamkan standar akuntansi untuk semua perusahaan di suatu negara di seluruh dunia dengan membuat standar yang seragam walaupun terasa kaku tetapi jika pelan-pelan dalam menerapkannya, maka penulis yakin semua perusahaan akan dapat menerimanya dengan baik.

4. MANFAAT IFRS

IASB membuat IFRS untuk mengharmoniskan standar akuntansi dan pelaporan keuangan diseluruh dunia membawa banyak manfaat jika di terapkan di suatu negara di seluruh dunia karena akan mempermudah dalam menggunakan laporan keuangan.

Menurut Kurniawan (2009) dalam Simbolon dan Nadeak (2010), dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).
- b. Mengurangi biaya SAK.
- c. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
- d. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
- e. Meningkatkan transparansi keuangan.
- f. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal.
- g. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Selain manfaat yang diungkapkan diatas, Wirahardja (2010) berusaha memperinci manfaat konvergensi IFRS, yaitu:

- a. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (*enhance comparability*).
- b. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.
- c. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang *fund raising* melalui pasar modal secara global.

Setiyono, et. al. (2011) juga memperinci manfaat konvergensi IFRS yang diungkapkan diatas, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan antara lain, mengurangi kesempatan untuk melakukan *earning management*

- 2) Reklasifikasi antar kelompok surat berharga (*securities*) dibatasi, cenderung dihilangkan
- 3) Reklasifikasi dari dan ke FVTPL, dilarang
- 4) Reklasifikasi dari L&R ke AFS, dilarang
- 5) Tidak ada lagi *extraordinary items*

Bank Indonesia juga mendukung penuh upaya IAI untuk melakukan konvergensi standar akuntansi Indonesia (PSAK) ke IFRS. Hal ini didasarkan pada beberapa manfaat yang didapat dari konvergensi IFRS menurut Bank Indonesia (2011), yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas standar laporan keuangan.
- b. Meningkatkan kredibilitas dan daya banding antar yuridiksi yang berlaku secara internasional.
- c. Memenuhi komitmen Indonesia sebagai anggota IFAC (*International Federation of Accountants*) dan sebagai anggota G-20.
- d. Berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan.

Menurut Hadibroto (2009) dalam Marlia (2009), manfaat dari program konvergensi IFRS diharapkan akan mengurangi hambatan-hambatan investasi, meningkatkan transparansi perusahaan, mengurangi biaya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan mengurangi *cost of capital*.

Pengadopsian IFRS akan bermanfaat untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan. (Gamayuni, 2009)

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari konvergensi IFRS ke dalam PSAK menurut Wahyuni (2011), di antaranya menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan, memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional. Bila

Indonesia sudah secara penuh mengadopsi IFRS maka kualitas informasi laporan keuangan di negara ini akan meningkat, termasuk kualitas laporan keuangan BUMN.

Manfaat-manfaat dalam menerapkan IFRS bagi Indonesia harus kita dukung bersama. Menurut penulis, jika kita mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi Indonesia, maka Indonesia akan sangat beruntung dari berbagai aspek, seperti IAI akan lebih menghemat pengeluaran untuk membuat standar karena tinggal mengadopsi IFRS dan standarnya akan lebih berkualitas, perusahaan-perusahaan yang *go public* atau perusahaan yang membuka cabang diluar negeri atau perusahaan asing yang membuka cabang didalam negeri akan lebih mudah dalam pelaporan keuangannya dan laporan keuangannya juga akan lebih berkualitas dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di berbagai negara. Namun penulis menyarankan agar dalam mengadopsi IFRS, IAI harus mempertimbangkan teori akuntansi, faktor politik dan kondisi ekonomi yang sesuai dengan yang ada dinegara kita karena jangan sampai terjadi pertentangan dengan kondisi yang sudah ada.

5. TAHAP-TAHAP ADOPSI IFRS DI INDONESIA

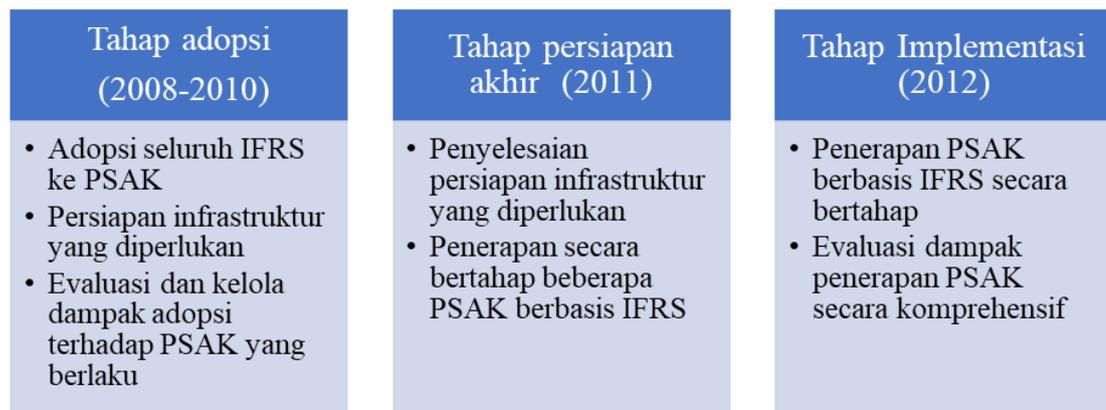
Dalam melakukan pengadopsian IFRS ke dalam PSAK harus melalui beberapa tahapan supaya dalam pengadopsian itu menjadi berhasil dengan baik. Berdasarkan proposal konvergensi yang telah dikeluarkan oleh IAI dalam Marisi P. Purba (2010), proses adopsi dibagi dalam 3 tahap, yaitu:

Tabel 1.

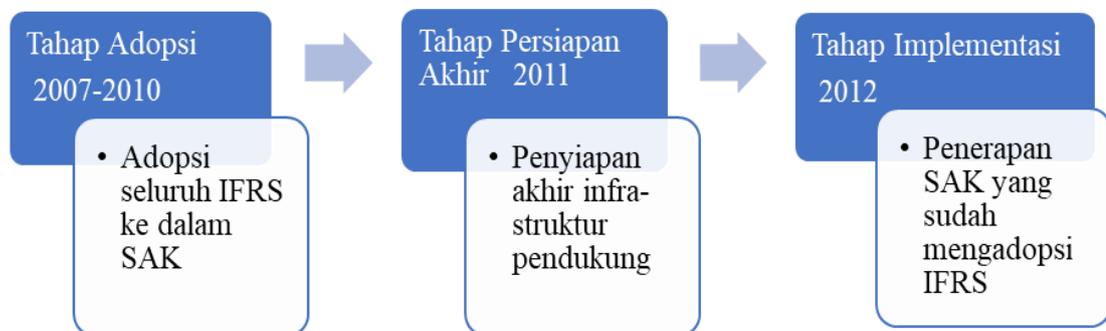
Proses Adopsi IFRS di Indonesia

No.	Tahap	Keterangan	Tahun
1.	Tahap adopsi	Adopsi seluruh IFRS terakhir ke dalam PSAK	2008-2010
2.	Tahap persiapan	Penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS	2011
3.	Tahap implementasi	Penerapan PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik	2012

Roadmap Konvergensi IFRS 2012 menurut Roy Iman Wirahardja (2010) yaitu



Roadmap Konvergensi IFRS 2012 menurut Rosita Uli Sinaga (2011) yaitu



Penerapan IFRS yang akan digunakan sebagai standar akuntansi Indonesia harus melalui berbagai tahapan supaya dapat diterima oleh para pengguna standar akuntansi Indonesia. Jika kita akan memperkenalkan sesuatu yang baru kepada seseorang, maka kita harus pelan-pelan memperkenalkan sesuatu yang baru itu supaya dapat diterima dengan baik. Menurut penulis, tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengadopsi IFRS sudah baik, dari tahap adopsi sampai tahap implementasi membutuhkan waktu selama 5 tahun.

Persiapan infrastruktur dan pengevaluasian dampak IFRS yang mungkin terjadi sudah dilakukan dengan baik. Namun penulis menyayangkan karena dalam tahapan diatas, IFRS belum ditawarkan kepada calon para pengguna PSAK berbasis IFRS secara menyeluruh dan mendalam sehingga ada kesan memaksa supaya harus mengikuti aturan ini. Padahal jika DSAK itu bersedia menawarkan terlebih dahulu kepada calon pengguna PSAK berbasis IFRS dan memberikan pengertian-pengertian tentang pengadopsian IFRS termasuk keuntungan PSAK berbasis IFRS, maka penulis yakin para pengguna PSAK berbasis IFRS akan lebih mantap dan lebih senang untuk

menggunakan PSAK berbasis IFRS. Penulis juga menyarankan supaya pengadopsian IFRS harus sesuai dengan kondisi negara Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan kondisi negara Indonesia sudah ada sejak dahulu.

6. PERSIAPAN ADOPSI IFRS

Tingkat kesiapan suatu perusahaan dalam melakukan adopsi IFRS dapat dilihat dari berbagai aspek sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini (P. Purba, 2010):

Tabel 2.

Aspek Kesiapan Penerimaan IFRS di Perusahaan

No.	ASPEK	TINDAKAN
1.	Sumber Daya Manusia	Lakukan program pelatihan IFRS bagi sumber daya manusia yang terkait, yaitu karyawan-karyawan yang bekerja pada divisi pelaporan keuangan, perpajakan, sistem informasi akuntansi, legal dan sumber daya manusia. Pelatihan IFRS dilakukan terlebih dahulu bagi direktur Keuangan atau CFO dan karyawan-karyawan kunci di bidang keuangan dan administrasi.
2.	Iklim legal dan perundang-undangan	Lakukan evaluasi atas semua kontrak yang sedang dan akan dijalankan oleh perusahaan. Hal ini untuk menghindari adanya kontrak-kontrak transaksi yang dapat menimbulkan implikasi terhadap laporan keuangan perusahaan.
3.	Sistem informasi akuntansi	Lakukan evaluasi atas <i>software</i> akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, apakah berbasis IFRS atau tidak. Jika tidak, maka perlu dievaluasi lebih lanjut untuk melakukan modifikasi atau mengganti <i>software</i> tersebut.
4.	Perpajakan	Lakukan evaluasi apa-apa saja konsekuensi perpajakan yang mungkin muncul sebagai akibat penerapan IFRS.
5.	Evaluasi atas struktur organisasi dan proses bisnis yang ada	Lakukan evaluasi untuk struktur organisasi dan proses bisnis yang ada untuk melihat kemungkinan perlu tidaknya merubah struktur organisasi dan proses bisnis yang ada.

Persiapan untuk menerapkan IFRS sebagai standar akuntansi Indonesia perlu disiapkan secara matang sehingga tidak akan menjadi persoalan dikemudian hari.

Sesuai yang diungkapkan diatas, penulis berpendapat bahwa hal yang utama yang harus dipersiapkan itu dibagi menjadi dua, yaitu sesuatu yang akan menggunakan IFRS dan sesuatu yang akan digunakan IFRS. Sesuatu yang akan menggunakan IFRS adalah segala sesuatu yang berhubungan dalam penggunaan IFRS, yaitu orang yang memakai IFRS dan *software* akuntansi yang berbasis IFRS. Dua hal itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena jika dua hal itu tidak mampu memahami IFRS secara baik, maka IFRS pun tidak mungkin dapat diterapkan sebagai standar akuntansi Indonesia dengan baik. Dua hal itu yang paling sulit diubah *mindset*-nya adalah orang yang akan menggunakan IFRS karena merubah *software* yang berupa benda mati yang bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita.

Orang yang akan menggunakan IFRS harus diberi pelatihan yang baik dan berkelanjutan untuk memahami betul IFRS. Pelatihan itu bisa dilakukan dalam bentuk *training* karyawan yang sudah bekerja dan pelatihan dalam bentuk perkuliahan bagi mahasiswa akuntansi. Penulis agak khawatir untuk pelatihan karyawan karena standar akuntansi yang sudah terbentuk dalam pikiran mereka harus diubah dan disesuaikan dengan IFRS. Hal itu sekiranya sangat sulit dilakukan, tetapi penulis yakin jika dilakukan pelatihan dengan baik dan berkelanjutan maka pikiran mereka sedikit demi sedikit akan bisa menyesuaikan. Lain halnya untuk perkuliahan, penulis yakin hal itu mudah dilakukan oleh mahasiswa jika mata kuliah akuntansi diubah menjadi akuntansi berbasis IFRS, maka hal itu akan lebih mudah dipelajari oleh mahasiswa baru yang akan mempelajari ilmu Akuntansi. Faktor yang kedua adalah sesuatu yang digunakan IFRS yaitu sistem perpajakan yang ada di Indonesia dan proses bisnis yang digunakan di Indonesia. Dua hal itu harus dievaluasi kemungkinan konsekuensi apa yang akan muncul setelah penerapan IFRS dilakukan dan bagaimana solusi nantinya yang akan digunakan untuk mengantisipasi dampak konsekuensi yang muncul setelah penerapan IFRS.

7. KENDALA PENGADOPSIAN IFRS

Menurut Marisi P. Purba (2010), ada tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam melakukan adopsi penuh IFRS. Permasalahan pertama adalah kurang siapnya infrastruktur seperti DSAK sebagai *financial accounting standard setter* di Indonesia. Permasalahan kedua adalah kondisi perundang-undangan yang belum

tentu sinkron dengan IFRS. Permasalahan ketiga adalah kurang siapnya sumber daya manusia dan dunia pendidikan di Indonesia.

Ada beberapa kendala yang menjadi penghambat penerapan IFRS sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan di dunia hingga saat ini. Kendala - kendala tersebut menurut Marisi P. Purba (2010) adalah

- a. Sistem hukum dan politik
- b. Sistem perpajakan dan fiskal
- c. Nilai-nilai budaya korporasi
- d. Sistem pasar modal dan peraturan terkait dengan kepemilikan korporasi
- e. Kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis
- f. Teknologi

Kemungkinan permasalahan yang akan terjadi menurut Purba (2010):

Tabel 3.

Kemungkinan Isu Terkait IFRS di Indonesia

NO	ISU	KEMUNGKINAN PERMASALAHAN
1.	Revaluasi aktiva tetap, aktiva properti dan aktiva biologi tidak diakui sebagai laba melainkan sebagai bagian dari ekuitas. Revaluasi aktiva tidak hanya menaikkan nilai aktiva tetapi juga dapat menurunkan nilai aktiva yang belum atau pernah direvaluasi (IAS 16, IAS 38, IAS 40 dan IAS 41)	Apakah selisih yang diperoleh dari revaluasi aktiva tetap, aktiva properti dan aktiva biologi sebagaimana diatur IAS 16, IAS 38, IAS 40 dan IAS 41 dikenakan pajak? Apakah aktiva yang telah direvaluasi nilainya berdasarkan peraturan perpajakan dapat kemudian diturunkan nilainya berdasarkan IAS 36? (Baca Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang "Perubahan keempat atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan" pasal 19 ayat 1 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK 03/2008 tentang "Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan") Apakah selisih yang diperoleh dari revaluasi aktiva tetap, aktiva properti dan aktiva biologi atau surplus revaluasi sebagaimana diatur didalam IAS 16, IAS 38, IAS 40 dan IAS 41 dapat dikonversikan sebagai modal saham? (Baca Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penyertaan

		modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN dapat bersumber dari keuntungan revaluasi aktiva).
2.	Laporan keuangan dapat dilaporkan dalam mata uang manapun. Namun akan lebih baik jika laporan keuangan dilaporkan dengan menggunakan mata uang fungsionalnya. Jika mata uang pelaporan berbeda dengan mata uang fungsional, maka manajemen wajib melakukan prosedur <i>remeasurement</i> untuk mengukur kembali saldo-saldo yang ada pada laporan keuangan tersebut ke dalam mata uang pelaporan (IAS 21)	Apakah diperbolehkan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain rupiah ? (Baca: Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 1a yang menyebutnya bahwa setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3	Pemegang saham dikelompokkan sebagai bagian dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pemegang saham BUMN adalah negara, sedangkan pemerintah adalah penyelenggara negara. Dalam kasus BUMN, harus bisa dibedakan saat kapan pemerintah bertindak sebagai pemegang saham	Dalam kasus BUMN, instansi pemerintah manakah yang digolongkan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa ? (Baca: Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang No 19 Tahun 2003 pasal 14 menyebutkan bahwa Menteri bertindak selaku

	mewakili negara dan saarkapan pemerintah bertindak sebagai regulator (IAS 24).	RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara).
4	Laporan keuangan interim harus disajikan dengan kualitas penyajian dan pengungkapan ' <i>condensed financial statements</i> ' atau laporan keuangan dengan penyajian yang dipadatkan (IAS 34).	BAPEPAM mengharuskan penyampaian laporan keuangan interim dengan kualitas penyajian dan pengungkapan yang sama dengan laporan keuangan tahunan. (Baca: Keputusan Ketua BAPEPEM No.Kep-36/PM/ 2003 tentang "Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala").
5	IAS dan IFRS harus diterapkan secara konsisten dengan berlandaskan pada <i>Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements</i> .	Dunia perbankan dan pasar modal Indonesia saat menggunakan dua sistem, yaitu sistem kapitalis murni dan syariah. IAS dan IFRS akan beresiko diterapkan sebagian-sebagian oleh perbankan dan lembaga keuangan yang berbasis syariah.
6	Sebagian besar standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada pada IAS dan IFRS menggunakan basis <i>fair value</i> atau nilai wajar sebagai basis penilaian atas aktiva, saham, obligasi, dan lain-lain. <i>Fair value</i> ditentukan dengan tiga jenjang, yaitu: 1. Harga pasar resmi, 2. Harga pasar produk sejenis, 3. Nilai wajar yang ditentukan <i>appraisal</i> . Dalam menentukan nilai wajar, prioritas utama ditekankan pada penggunaan harga pasar resmi aktiva yang dinilai.	Tidak semua jenis aktiva memiliki harga pasar resmi. Jika IAS dan IFRS diterapkan secara penuh di Indonesia, sebagian besar nilai wajar akan ditentukan dengan menggunakan jasa <i>appraisal</i> atau konsultasi penilai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan: Apakah profesi <i>appraisal</i> di Indonesia telah siap dalam menyokong adopsi IFRS?

Menurut Sinaga (2011), kendala penerapan IFRS, diantaranya :

- a. Pemahaman semua pemangku kepentingan atas dampak konvergensi IFRS 2012
- b. Perbedaan peraturan perundangan dengan SAK
- c. Beda pengaturan pengukuran dan pengakuan laba, aset dan liabilitas yang semakin besar antara akuntansi dan pajak
- d. Infrastruktur ketersediaan data untuk pengukuran aset dan liabilitas berbasis fair value
- e. Perbedaan interpretasi atas SAK
- f. Sumber daya manusia yang memahami SAK berbasis IFRS

Kendala dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS menurut Setiyono, et. al. (2011), adalah:

- a. Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya
- b. IFRS berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih dilakukan, pihak IASB sudah dalam proses mengganti IFRS tersebut
- c. Kendala bahasa, karena setiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan acapkali ini tidak mudah
- d. Infrastruktur profesi akuntan yang belum siap untuk mengadopsi IFRS banyak metode akuntansi yang baru yang harus dipelajari lagi oleh para akuntan
- e. Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS
- f. Dukungan pemerintah terhadap isu konvergensi

Suatu yang baru pasti akan berkendala jika diterapkan untuk menggantikan sesuatu yang sudah ada. IFRS adalah standar akuntansi baru di negara Indonesia, padahal Indonesia sendiri sudah mempunyai standar akuntansi yang berkiblat pada FASB Amerika Serikat. Sekarang muncul standar akuntansi baru yang nantinya akan menjadi kiblat bagi standar akuntansi negara di seluruh dunia yaitu IFRS produk dari IASB. Kendala yang akan muncul dalam pengadopsian IFRS sebagai standar akuntansi di Indonesia, menurut penulis sesuai yang diungkapkan diatas, yang paling utama adalah sumber daya manusia.

Para pengguna IFRS secara teori dan praktek yang akan menggunakan standar akuntansi berbasis IFRS. Para pengguna IFRS secara teori, yaitu mahasiswa akuntansi yang mempelajari akuntansi yang berkiblat pada standar akuntansi berbasis IFRS. Dalam sistem perkuliahan akuntansi harus mengubah kurikulum pembelajaran akuntansi menjadi berbasis IFRS sehingga nantinya mahasiswa akan mempelajari

akuntansi berbasis IFRS. Para pengguna IFRS secara praktek, yaitu profesi dan karyawan perusahaan yang menggunakan akuntansi berbasis IFRS. Menurut penulis, hal ini agak sulit dilakukan karena harus mengubah pemikiran pengguna akuntansi secara praktek sehingga dibutuhkan pelatihan secara baik dan berkelanjutan.

8. KESIMPULAN

Standar akuntansi mengalami perubahan yang cukup besar karena terdapat ide untuk membuat suatu kesepakatan harmonisasi standar akuntansi negara di seluruh dunia. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat IASC yang memproduksi IAS dan kemudian berubah menjadi IASB yang memproduksi IFRS. Hal itu dilakukan karena mengikuti perkembangan zaman yang memperlumahkan standar akuntansi. IASB membuat IFRS karena berkeyakinan bahwa kebutuhan standar akuntansi di seluruh dunia sangatlah besar apalagi persaingan industri di era global ini menghendaki keseragaman standar akuntansi sehingga antar laporan keuangan bisa dibandingkan dengan yang lain.

IFRS mempunyai karakteristik yang salah satunya adalah *principles based*, yaitu mempunyai aturan yang umum dan lebih pendek daripada *rules based* yang digunakan FASB. Dengan karakteristik dan pemikiran IASB itulah, maka negara-negara di hampir seluruh dunia itu mulai mengadopsi IFRS secara penuh maupun bertahap, termasuk Indonesia. Negara Indonesia mengadopsi IFRS karena banyak manfaat yang didapat Indonesia jika mengadopsi IFRS, salah satunya adalah menghemat biaya pembuatan standar akuntansi dan menambah kualitas standar akuntansi Indonesia sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan dapat digunakan di dunia internasional.

Pengadopsian IFRS sebagai standar akuntansi Indonesia dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir, dan tahan implementasi. Dalam proses pengadopsian itu, ternyata di Indonesia terdapat kendala yang harus dihadapi yang paling utama adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu harus dilakukan pelatihan secara baik dan berkelanjutan bagi DSAK dan para pengguna IFRS secara teori maupun praktek sehingga dapat memahami IFRS secara baik dan nantinya dapat menggunakan standar akuntansi Indonesia berbasis IFRS untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas sehingga pengguna laporan keuangan akan puas dan yakin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2011. Konvergensi IFRS: Dampak dan Strategi yang harus Disiapkan. (<http://www.iaiglobal.or.id>).
- Baridwan, Zaki. 2012. Akuntansi Internasional. (Dalam perkuliahan Teori Akuntansi di Magister Sains dan Doktor FEB UGM tanggal 07 Mei 2012)
- Dodd, Wolk, H.I., J.L. and Rozicki. *Accounting Theory-Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*. 7th Ed. Sage Publications Inc.
- Ersa Tri Wahyuni. 2011. Penerapan IFRS Efisienkan Penyusunan Laporan Keuangan (<http://www.antaraneews.com/berita/1311187224/penerapan-IFRS-efisienkan-penyusunan-laporan-keuangan>).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. Konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia ke *International Financial Reporting Standards* (IFRS). (<http://www.iaiglobal.or.id>).
- Marlia. (2009). *IFRS Harmonization for a Better Indonesian Future*. (<http://www.unpad.ac.id/archives/20531>).
- Purba, Marisi P. 2010. *International Financial Reporting Standards-Konvergensi dan kendala Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gamayuni, Rindu Rika. 2009. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju *International Financial Reporting Standards*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 14 No.2.
- Sinaga, Rosita Uli. 2011. Konvergensi IFRS. (<http://www.iaiglobal.or.id>).
- Wirahardja , Roy Iman. 2010. Adopsi IAS 41 dalam Rangkaian Konvergensi IFRS di Indonesia. (<http://www.iaiglobal.or.id>).
- Simbolon, Harry Andrian Dan Ludovikus Nadeak. 2010. Menuju Penerapan IFRS 2011 ([Http://Akuntansibisnis.Wordpress.com/2010/10/12/Menuju-Penerapan-IFRS-2011](http://Akuntansibisnis.Wordpress.com/2010/10/12/Menuju-Penerapan-IFRS-2011)).